

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanpa kita sadari bahwa akuntansi sektor publik telah berkembang sangat cepat, terlebih setelah terjadinya reformasi di Indonesia. praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya menyita perhatian publik pada saat ini. Salah satu cara untuk meningkatkan perhatian yang positif adalah dengan meningkatkan Kinerja Satuan Perangkat Daerah agar dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas akan menambah kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang bersih dapat di wujudkan dengan cara menuntut pengelolaan keuangan daerah untuk transparan, akuntabel, dan tertib.

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kasmir (2018:7), Pemerintah Daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan (Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010). Dalam jurnal yang ditulis oleh Kadek Desiana Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain relevan (relevance), andal (reliability), dapat

dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas harus berpedoman kepada standar akuntansi pemerintahan karena dalam jurnal yang ditulis oleh Kadek Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan adalah dengan menerapkan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil audit BPK Jawa Barat, banyak pemerintahan daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan Ikhtisar hasil pemeriksaan tahun 2018 di Jawa Barat, BPK memberikan WTP atas 25 entitas, opini WDP atas 3 entitas.(BPK JABAR,2021) Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah kabupaten Bandung Barat telah mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) sebanyak 8 kali berturut turut terhitung sejak tahun pelaporan 2011-2018 Informasi tersebut dapat dilihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2011- 2018. Hal ini mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum dapat menyajikan laporan

keuangannya secara wajar.

Tidak hanya itu Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat digemparkan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan dana Covid-19 oleh bupati AA Umbara, Juru Bicara KPK Ali Fikri (2020), hal ini menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana kualitas laporan keuangan yang di hasilkan apabila terjadi kasus seperti ini, bagaimana sistem pengendalian internalnya sehingga hal ini dapat terjadi, apakah penerapan standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan ataupun sebaliknya. Ini mengartikan bahwa masih banyak permasalahan yang muncul, seperti yang disebutkan dalam IHPS I BPK (2020), yaitu:

1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal
2. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan
3. Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan

Sistem pengendalian internal pemerintah perlu diadakannya pengamatan yang nantinya dari pengamatan itu akan menemukan temuan yang menjadi faktor penyebab terjadinya opini BPK yang tidak berubah dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Suatu cara untuk mengarahkan dan mengawasi organisasi adalah dengan menggunakan Sistem Pengendalian Internal pemerintah, yang juga dapat berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (fraud).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umar Sako dan Felmi D. Lantowa dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dengan judul “pengaruh penerapan

standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah kabupaten gorontalo”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini disertakan variabel Sistem Pengendalian Internal yang merupakan bagian penting untuk membuat laporan keuangan, yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas indikasi diatas.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai besarnya pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat digemparkan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan dana Covid-19 oleh bupati AA Umbara, Bupati Bandung Barat melakukan *refocusing* anggaran penanggulangan Covid-19 dalam bentuk belanja tak terduga (BTT) Tahun anggaran 2020, Juru Bicara KPK Ali Fikri (2020).

Permasalahan yang muncul, seperti yang disebutkan oleh BPK JABAR (2020) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal
2. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan
3. Ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2. Seberapa besar pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambaran mengenai implementasi sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan
2. Mengetahui bagaimana penerapan standar Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1.5.1.1 Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai Pengaruh sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

1.5.1.2 Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah, sebagai informasi dan bahan evaluasi dan masukan atas penerapan Standar Akuntansi pemerintah yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

1.5.1.3 Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang

akuntansi khususnya sistem pengendalian internal dan penerapan akuntansi pemerintahan di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan lebih lanjut, bagaimana dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya yang tercermin dalam penampilannya.

